

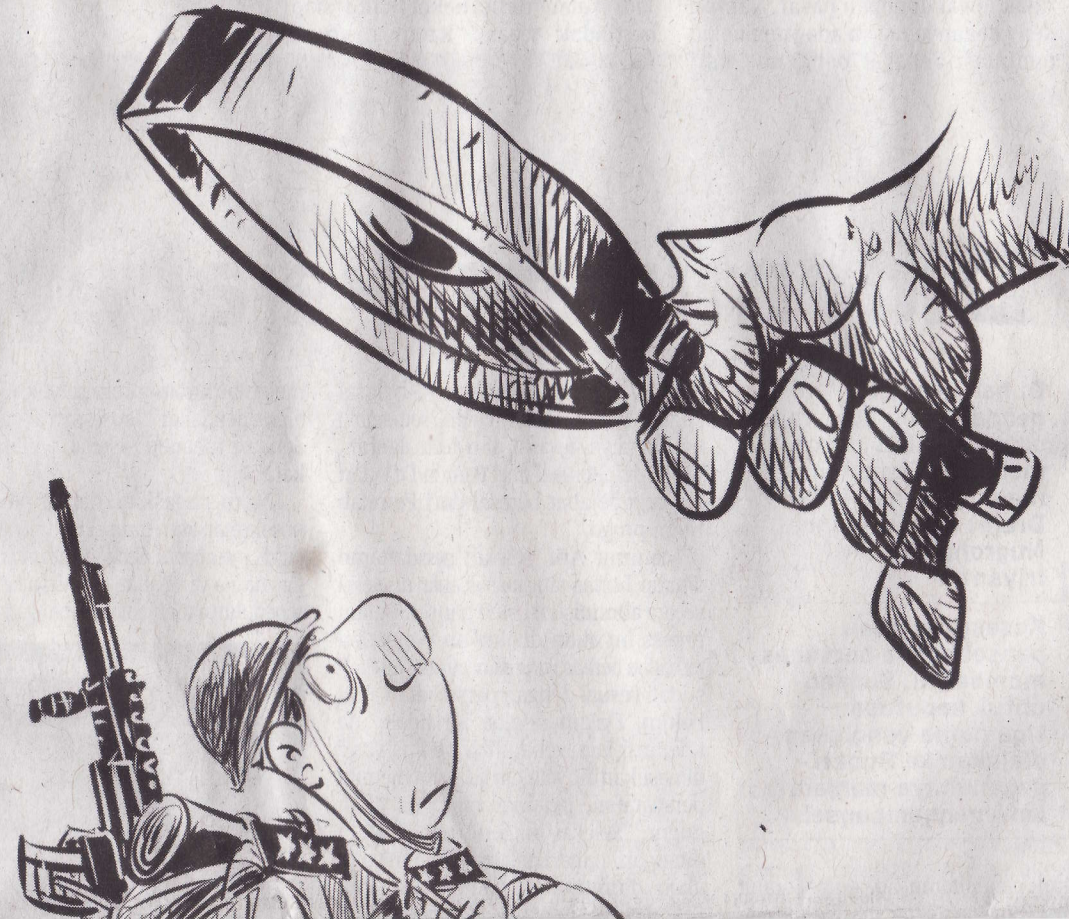
## Mengawal Rekonstruksi Peran TNI

*Hendra Kurniawan*

*Dosen Pendidikan Sejarah di Universitas  
Sanata Dharma Jogja*

**T**anggal 5 Oktober 2016, Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 71 tahun. Dalam usianya yang cukup asam garam, TNI telah mengalami pergeseran-pergeseran baru yang semakin memperkokoh hak dan kewajibannya dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara. Sejarah mencatat kemunculan TNI untuk memenuhi panggilan sejarah dan revolusi kemerdekaan. TNI dibentuk dengan tujuan membela dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, hidup bersama rakyat dan untuk membela kepentingan rakyat. Mengingat bahwa TNI lahir dari rakyat, maka sudah barang tentu TNI memang benar-benar milik masyarakat. Berbagai hal yang menjadi tantangan rakyat, juga berarti menjadi tantangan TNI. Dikarenakan TNI berasal dari rakyat dan berada di tengah-tengah rakyat, maka terjadilah interaksi



TNI. Antara lain dalam membantu pembangunan karakter, fisik, hingga bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sipil. Untuk itu TNI harus terus menjaga dan memelihara kemandungannya dengan rakyat.

Pada masa sekarang, TNI perlu mendukung tegaknya supremasi sipil dalam berbagai ranah, terutama politik. Hal ini penting agar perannya bisa terlaksana tanpa melahirkan berbagai kecurigaan, terutama di kalangan masyarakat yang semakin kritis. Tantangan untuk mempertahankan kredibilitas TNI bukan hal yang mudah dan perlu perhatian serta praktik yang sungguh-sungguh. Upaya depolitisasi terhadap TNI agar tidak campur tangan dalam politik perlu terus dikawal. Apalagi pilkada serentak sudah di depan mata.

Kondisi negara yang masih rentan pertentangan dan provokasi membutuhkan kehadiran TNI yang dapat mengaktualkan peran dinamisatornya. Sebagai dinamisator, TNI harus mampu membangkitkan semangat kebersamaan di kalangan berbagai organisasi sosial politik masyarakat. Kemampuan mendinamisasikan kehidupan politik dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa itulah yang diharapkan masyarakat dengan

rakyat, maka terjadilah interaksi yang tidak bisa dihindari. TNI manunggal bersama rakyat.

TNI mempunyai peran utama dalam menjaga NKRI harga mati dan wawasan kebangsaan. Sejarah militer negara ini mencatat bahwa embrio TNI berupa Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan laskar-laskar rakyat. Tampilnya laskar-laskar rakyat ini jelas tanpa persenjataan lengkap dan tanpa pakaian seragam sempurna. Pada waktu itu tidak ada tuntutan profesionalisme, lebih utama tekad dan semangat juang yang bersemayam di dalam dada setiap anggota laskar rakyat. Gelora untuk tetap merdeka dan rela berkorban demi tetap tegaknya kemerdekaan serta kedaulatan NKRI.

Melihat kenyataan ini dan berdasarkan berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang menyatakan bahwa semua badan perjuangan, termasuk laskar-laskar menjadi angkatan bersenjata yang berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Sejak inilah TNI sebagai penyangga berdirinya NKRI resmi dibentuk dan tanggal 5

Oktober 1945 itulah yang sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya TNI.

Dalam perkembangan selanjutnya, TNI semakin kokoh dan kuat, baik dari segi persenjataan maupun dari segi semangat perjuangan. Begitu efektifnya TNI, sehingga membuat banyak pihak tertarik atau sebaliknya mencurigai peran TNI tersebut. Apalagi

pada masa Orde Baru dengan terus melembaganya Dwifungsi ABRI, TNI hadir tidak hanya dalam fungsi pertahanan namun juga pengendali situasi sosial politik. Sebagai alat negara saat itu TNI digunakan pemerintah sebagai kekuatan yang paling dominan dalam mengatasi berbagai masalah dan konflik yang muncul di masyarakat baik politik,

sosial, sampai ekonomi.

### Depolitisasi

Memasuki Reformasi, situasi ini mulai banyak berubah. Dwifungsi ABRI dicabut dan TNI kembali pada khitahnya menjaga kedaulatan dan ketahanan NKRI. Meskipun demikian banyak persoalan lain dalam situasi damai yang membutuhkan peran

yang diharapkan masyarakat dengan tetap menghormati pemerintahan sipil yang ada tanpa memihak salah satu kekuatan politik.

TNI yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat, tetap akan menjadi pelindung bagi semua lapisan masyarakat. Secara ideologis, khususnya dalam perjuangan mencapai cita-cita bangsa, TNI harus tetap netral. Kenetralan ini sudah mulai dilakukan sejak Pemilu 1999 hingga 2014 kemarin. Sementara sebagai kekuatan pertahanan, kemampuan TNI jelas tidak diragukan lagi. Memasuki era demokrasi yang sejati, juga memberi pengalaman bagi TNI untuk bersikap hati-hati dalam merespon berbagai persoalan bangsa.

Upaya rekonstruksi peran TNI pada prinsipnya mendorong agar TNI mampu menjadi pengawal negara tanpa harus berpolitik. TNI harus mampu melindungi yang lemah tanpa harus menjadi arogan. Keberpihakan kepada yang lemah sudah menunjukkan TNI sebagai lembaga demokratis. Dengan demikian TNI akan senantiasa di hati rakyat dan manunggal bersama rakyat untuk Indonesia yang semakin maju dan demokratis.



Harian Jogja/Hengki Irawan